

**PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG
PENGURUSAN HARTA BAWAAN YANG DIWARISI DARI
IBU YANG TELAH MENINGGAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

OKI OKTARIANI

C100120036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG
PENGURUSAN HARTA BAWAAN YANG DIWARISI DARI
IBU YANG TELAH MENINGGAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Oki Oktariani
C100120036

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written over a faint circular stamp.

(Nuswardhani, S.H.,S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG
PENGURUSAN HARTA BAWAAN YANG DIWARISI DARI
IBU YANG TELAH MENINGGAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

Oki Oktariani
C100120036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 1 November 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U

Sekretaris : Shalman Al Farizi, S.H., S.E., M.M., M.Kn

Anggota : Darsono S.H., M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 November 2016

Yang menyatakan,



Oki Oktariani
C100120036

**PROSES PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM TENTANG
PENGURUSAN HARTA BAWAAN YANG DIWARISI DARI
IBU YANG TELAH MENINGGAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR OLEH AYAHNYA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)**

Oki Oktariani
C100120036
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
okiokta@rocketmail.com

ABSTRAK

Adanya kendala seorang suami yang akan mengurus harta bawaan istri yang telah meninggal terhadap anaknya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan ijin pengadilan dalam mengurusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan perdata atas permohonan pengurusan harta bawaan milik istri yang telah meninggal oleh suami terhadap anak di bawah umur, untuk mengetahui akibat hukum setelah dijatuhkannya penetapan pengurusan harta bawaan milik istri yang telah meninggal oleh suami terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, akibat hukum bagi para pihak dalam persidangan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon dikabulkan, pemohon dibebani untuk bertanggungjawab atas pengurusan harta bawaan milik anaknya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut dewasa.

Kata kunci: *putusan perdata, penyelesaian permohonan di pengadilan negeri*

ABSTRACT

The constraints of a husband who would take care of congenital treasure wife who had died on his son because the child is still a minor and thus require court permission to take care of it. This study aims to determine the consideration of the judge in determining the determination of civil upon the request of the management of assets innate property of the wife who had died by the husband against minors, to determine the legal consequences after the imposition of the determination of the maintenance of the property innate property of the wife who had died by the husband against children under age. The research method using normative juridical approach that is descriptive. Using this type of primary data and secondary data. Data collection techniques used through the study of literature, questionnaire and interview. By using descriptive qualitative data analysis. The results showed that the consideration of the judge looks at the evidence at trial, legal consequences for the parties in the hearing the applicant can prove petition, that the petition applicant is granted, the applicant is charged with responsibility for the management of assets innate property of children under age until the child is an adult.

Keywords: *civil verdict, settlement petition in state court*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang biak. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga dimana keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.¹

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Sekalipun judul resminya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, tetapi kalau kita simak isi undang-undang tersebut, maka ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga mengatur tentang akibat-akibat perkawinan. Dengan demikian dapat kita katakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974) berisi ketentuan-ketentuan tentang Hukum Keluarga.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan meliputi antara lain: (1) Perkawinan, dalam mana termasuk hubungan hukum kekayaan antara suami-istri, (2) Hubungan orangtua dan anak, (3) Hubungan wali dan anak yang di bawah perwaliannya,

¹Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal 1.

²K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal 1

³J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 3-4

dan (4) Hubungan *curator* dan *curandus*. R. Soebekti memberikan perumusan yang kurang lebih sama, dan juga dengan tegas mengatakan, bahwa Hukum Keluarga meliputi juga hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan antara suami istri. Jadi Hukum Keluarga meliputi perkawinan dengan semua segi-seginya, akibat yang timbul dari adanya perkawinan.⁴

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi undang-undang ini memberi peluang untuk memberlakukan sistem hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk pembagian harta bersama.⁵

Pada prinsipnya suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Pasal 36 UU No. 1/1974) sehingga istri ataupun suami memperoleh *beheer* atas hartanya. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya.

⁴R. Soebekti, 1983, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke XVII, Jakarta: Intermasa, hal. 16

⁵Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 215

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah dengan rumusan: *pertama*, bagaimanakan pertimbangan hakim dalam menentukan dikabulkannya permohonan pengurusan harta bawaan dari istri yang telah meninggal untuk anak oleh ayah dalam pengadilan; *kedua*, bagaimanakan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pengurusan harta bawaan terhadap hak anak di bawah umur yang mendapat harta dan ayah yang mengurus harta tersebut.

3. TUJUAN PENELITIAN

Rumusan di atas dilakukan peneliti demi tujuan yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan dikabulkannya permohonan pengurusan harta bawaan dari istri yang telah meninggal untuk anak oleh ayah dalam pengadilan dan untuk mengetahui akibat hukum harta bawaan terhadap hak anak yang mendapat harta dan ayah yang mengurus harta tersebut.

4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dibuatnya karya tulis ini maka diharapkan akan mampu memberikan berbagai manfaat baik itu sebagai pengetahuan mendalam untuk diri penulis sendiri terkait pengelolaan harta bawaan istri untuk anak di bawah umur oleh ayah, baik itu sebagai pijakan hukum masyarakat dalam menyelesaikan persoalan terkait karya tulis maupun untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Dikabulkannya Permohonan Pengurusan Harta Bawaan dari Istri yang Telah Meninggal untuk Anak Oleh Ayah dalam Pengadilan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan termasuk mengenai harta bawaan, Pasal 36 ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶ Maksud dari frase “menentukan lain” di sini ialah calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29 UU No.1/1974): *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*, hal mana memberi petunjuk, bahwa ketentuan mengenai hukum harta Perkawinan dalam U.U.P. bersifat hukum yang menambah dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya.⁷ Jadi yang dimaksud dengan dengan harta bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri sebelum adanya perkawinan.

⁶Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 215

⁷J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7

Pasal 36 ayat (2) UU No.1/1974 mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hibah/atau atas dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya. Sehingga atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya. Jadi, harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.⁸ Sedangkan definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu: Pasal 47 ayat (1) UU No.1/1974 yang berbunyi: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”* yang apabila dijabarkan maka yang dimaksud anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

⁸ Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Bandung: Gitamaya Jaya, hal, 19.

melangsungkan perkawinan, mereka masih di bawah kekuasaan orang tuanya dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Jadi, pengertian anak di bawah umur di sini adalah orang yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukumnya sendiri.

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 36-nya, UU Perkawinan menegaskan:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi, kiranya dapat ditafsir bahwa dengan berakhirnya perkawinan karena kematian maka harta bawaan kembali pada si pemilik harta bawaan tersebut, jika memang si almarhum memiliki harta bawaan maka kesemuanya harus dikembalikan pada pihak si Almarhum atau yang memiliki garis lurus keturunan dari pihak almarhum tersebut. Dalam hal terkait harta bawaan, tentunya si suami/istri almarhum tidak memiliki hak atas harta bawaan dimaksud. Setelah harta bawaan dipisahkan dari harta bersama, maka baru dapat dilakukan pembagian harta bawaan dimana masing-masing ahli waris mendapat bagian miliknya masing-masing (terkecuali jika ada perjanjian pra nikah, maka ketentuan ini tidak berlaku, yang berlaku adalah ketentuan yang ada dalam perjanjian pra nikah).

Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan: *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan*

suami atau isteri yang hidup terlama".⁹ Hal mana memberi petunjuk bahwa ahli waris dengan garis keturunan lurus lah yang akan mendapat bagian warisan dari harta bawaan sedangkan pemilik bagian dari warisan harta bersama adalah suami/istri yang masih hidup kemudian setelah itu adalah keluarga sedarah. Jadi, pembagian terhadap harta bawaan disini diberikan secara prorata kepada ahli waris dari pihak almarhum yakni orang yang mempunyai garis lurus keturunan dari si almarhum dan dalam ini adalah anak dari almarhum atau bila tidak ada baru garis lurus keturunan keatas dari pihak si almarhum. Sehingga dalam pembagian harta bawaan si almarhum suami atau istri dari almarhum tidak memiliki hak atas harta tersebut.

Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Namun, sekedar itu tidak cukup apabila ahli waris masih belum cukup umur, ia masih memerlukan orang dewasa atau orang tuanya yang masih hidup untuk melakukan perbuatan hukum agar mewakili kepentingannya dalam mengurus harta warisan miliknya hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi: *"Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya."* Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan

⁹Membagi Harta Bawaan dan Harta Warisan, diakses dari: <http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2010/01/membagi-harta-bawaan-dan-harta-warisan.html>, Diakses tanggal 23 September 2016, Pukul 14.30 WIB.

sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.¹⁰ Jadi, pengurusan harta bawaan terhadap anak yang masih di bawah umur memerlukan orang tua yang masih hidup atau wali yang mampu mengelola (*beheer*) harta tetap yang dimiliki ahli waris untuk kepentingan ahli waris tersebut sampai dia cukup umur sehingga dikatakan mampu melakukan perbuatan hukumnya sendiri.

Permohonan oleh Karyono (Pemohon) tersebut adalah dalam hal pengelolaan harta bawaan milik Almarhum istrinya yakni Yani Rositawati di mana meninggalkan harta bawaan untuk kedua anaknya yakni Natanael Septianto (23 tahun) dan Andreas Aditya Prasetiawan (16 Tahun) dimana anak kedua tersebut masih di bawah umur karena belum berusia 18 tahun, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri kecuali diwakili oleh walinya yang dalam hal ini jatuh pada pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonannya untuk menjual harta bawaan milik istrinya untuk kepentingan anak-anaknya karena Pemohon sebagai karyawan swasta yang pendapatannya sangat terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya yang masih di bawah umur terutama dalam bidang pendidikan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

Pertama, apakah benar anak yang bernama Andreas Aditya Prasetiawan adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah antara Pemohon dengan isterinya yang bernama Yani Rositawati, yang hingga sekarang masih di bawah umur? Dalam pertimbangan yang pertama,

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Op Cit*, hal, 114.

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ayah kandung) dari anak yang bernama Andreas Aditya Prasetiawan yang sekarang berumur sekitar 16 tahun (lahir tanggal 3 Nopember 1997), sehingga anak tersebut masih tergolong di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Kedua, apakah benar anak yang bernama Andreas Aditya Prasetiawan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan harta yang dimohonkan untuk diberikan ijin menjual tersebut? Dalam hal ini karena hal meninggalnya istri dari Karyono yakni Yanti Rositawati maka timbullah akibat terhadap harta bawaan milik almarhum tersebut yakni jatuhnya harta tersebut kepada ahli waris yang mempunyai garis lurus keturunan terhadap almarhum dan yang terdekat pada garis ini adalah anak-anak dari almarhum yakni Natanael Septianto sebagai anak pertama(bukti P-4) dan Andreas Aditya Prasetiawan sebagai anak kedua (bukti P-5).

Hingga sekarang Pemohon masih menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap Andreas Aditya Prasetiawan yang masih di bawah umur tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 394 Juncto pasal 396 KUHPdata maka orang tua kandung dalam hal ini Pemohon selaku orang tua yang masih hidup yang sekaligus bertindak sebagai wali dapat menjual barang tak bergerak atas ijin Pengadilan. Hal tersebut didasarkan atas Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama Andreas Aditya Prasetiawan, dan Pemohon selaku orang tua yang masih hidup dapat diberi ijin untuk dan atas nama anak yang masih di bawah

umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut termasuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual sebagian tanah yang menjadi bagian dari anak Pemohon yang bernama Andreas Aditya Prasetiawan yang masih di bawah umur tersebut atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 999.

Putusan di atas dikabulkan dengan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim antara lain bahwa Pemohon terbukti sebagai orang tua kandung (ayah kandung) dari anak yang bernama Andreas Aditya Prasetiawan hasil perkawinannya dengan Yani Rositawati yang sekarang berumur sekitar 16 tahun sehingga anak tersebut masih tergolong di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu karena hal meninggalnya istri dari Karyono yakni Yanti Rositawati maka timbullah akibat terhadap harta bawaan milik almarhum tersebut yakni jatuhnya harta tersebut kepada ahli waris yang mempunyai garis lurus keturunan terhadap almarhum dan yang terdekat pada garis ini adalah anak-anak dari almarhum yakni Natanael Septianto sebagai anak pertama dan Andreas Aditya Prasetiawan sebagai anak kedua. Berdasarkan ketentuan pasal 394 Juncto pasal 396 KUHPerdara maka orang tua kandung dalam hal ini Pemohon selaku orang tua yang masih hidup yang sekaligus bertindak sebagai wali dapat menjual barang tak bergerak atas izin Pengadilan demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur tersebut karena tidak mampu memenuhi kepentingan mendasar anaknya terutama pendidikan sehingga apabila tidak diijinkan untuk menjual tanah milik anaknya yang merupakan harta bawaan dari almarhum istri pemohon maka justru akan menimbulkan kerugian bagi anaknya yang masih di bawah umur yakni Andreas Aditya Prasetiawan.

6.2. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Pengurusan Harta Bawaan Terhadap Hak Anak di bawah Umur yang Mendapat Harta dan Ayah yang Mengurus Harta Tersebut

Pada prinsipnya suami mengurus/mengemudikan harta kekayaan milik istri, kecuali dalam hal istri memperjanjikan lain (Pasal 105 ayat 3 BW) dan dalam hal si istri memperoleh kembali *beheer* atas hartanya (Pasal 194 jo Pasal 244 BW). Pengurusan *beheer* suami di sini didasarkan atas haknya sendiri, ia tidak tunduk pada perintah-perintah atau petunjuk istri, ia bertindak menurut pertimbangan dan keputusannya sendiri.

Hak pengurusan *beheer* suami di sini didasarkan atas kekuasaan maritalnya (*maritale match*). Namun harus digarisbawahi bahwa kepengurusan suami atas barang-barang tak bergerak milik pribadi istri dibatasi sampai tindakan-tindakan *beheer* saja. Ia tidak diperkenankan untuk memindah tangankan dan membebani tanpa persetujuan istri (Pasal 105 ayat 5 BW).¹¹ Namun dalam hal istri sudah meninggal maka harta pribadi milik istri akan turun pada ahli waris sehingga memerlukan persetujuan ahli waris dalam mengurus harta dan demi kepentingan ahli warisnya. Jadi, peran ayah dalam pengurusan harta bawaan istri yang telah meninggal ialah pada tindakan *beheer* saja dalam hal suami ingin melakukan tindakan lebih dari itu maka memerlukan persetujuan dari ahli waris apabila si ahli waris masih di bawah umur, namun apabila ahli waris sudah mencapai cukup umur dan mampu melakukan perbuatan hukumnya sendiri maka suami tidak lagi memiliki hak atas harta bawaan milik istrinya tersebut.

Berdasarkan keterangan narasumber, mengenai ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut, yaitu setelah diputuskan oleh majelis hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon harus pula termasuk mengelola (melakukan perbuatan hukum) atas harta warisan milik anaknya yang

¹¹ P. Scholten, 1934, *Serie Asser. "Algemeen Deel"*. Tjeenk Willink, Zwolle, hal 226

masih di bawah umur demi kepentingan anak tersebut. Dalam hal ini karena pemohon mengajukan perwalian atas salah satu diantara 2 anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan dari ibu yang telah meninggal, maka harta bawaan tersebut boleh dikelola oleh ayah yang masih hidup hanya untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur tersebut. Harta yang dikelola oleh ayah sebagai wali tersebut sebatas pada harta bawaan yang diwarisi bagian dari anak yang masih di bawah umur sedangkan sisa harta bagian dari anak yang telah dewasa tetaplah di bawah kekuasaan penuh anak yang sudah dewasa tersebut.

Suatu perbuatan hukum tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Dalam hal ini apabila permohonan tentang pengurusan harta bawaan anak di bawah umur oleh pemohon yang sesuai dengan isi putusan yang sudah diputuskan oleh majelis hakim, maka dari itu perwalian pengurusan harta bawaan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang baru terhadap harta bawaan dari ibu yang sudah meninggal tersebut.

Bapak Kun Maryoso, SH.,MH. mengatakan bahwa: “akibat hukum yang timbul setelah harta bawaan tersebut pengurusannya jatuh ketangan suami yang masih hidup, maka akibat hukumnya adalah harta bawaan tersebut boleh dan sah dikelola baik itu *beheernya* saja maupun perbuatan yang menimbulkan akibat hukum oleh ayah dari ahli waris yang masih di bawah umur tersebut. Dengan demikian menjadi sah bagi pemohon untuk menjual tanah warisan milik anaknya yang masih di bawah umur, sehingga kedua anak ahli waris dari harta bawaan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dari harta bawaan yang diwarisinya.”¹²

Atas penetapan majelis hakim tersebut menimbulkan akibat hukum baik itu bagi pemohon dan ahli waris yang masih di bawah umur tersebut, yakni kewajiban bagi pemohon untuk mengelola harta bawaan dari istrinya

¹²Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 5 Oktober 2016, Pukul 13.00 WIB

yang telah meninggal demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur termasuk menjual tanah warisan yang merupakan harta bawaan dari istrinya yang telah meninggal tersebut untuk kepentingan anaknya yang masih di bawah umur terutama untuk pendidikannya, pemohon wajib mengelola harta bawaan tersebut dengan baik sampai anak yang masih di bawah umur tersebut dewasa dan mampu mengelola sendiri harta bawaan dari ibunya. Sehingga menjadi sah apabila pemohon menjual sepetak tanah milik anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Pemohon dalam hal ini tidak boleh mempergunakan hasil dari penjualan tanah tersebut untuk kepentingannya pribadi dan demi melindungi hak-hak dari anak yang masih di bawah umur tersebut maka wajib bagi pemohon untuk membuat rincian pengeluaran penggunaan harta milik anak tersebut sehingga jelas berapa pengeluaran untuk anak tersebut selama ia masih di bawah umur dan mengembalikan sisanya apabila anak tersebut sudah dewasa. Hal ini karena pemohon tidak sama sekali memiliki hak atas harta bawaan tersebut melainkan hanya memiliki hak untuk mengelola demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur.

7. PENUTUP

7.1.Kesimpulan

Pertama berdasarkan kesimpulan pembuktian tersebut di atas pemohon dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya melalui alat bukti dan saksi yang ia ajukan di persidangan. Jelas bahwa alasan dari majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon tersebut adalah dari adanya fakta-fakta yang timbul dalam persidangan yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon. Dengan pernyataan tersebut maka Hakim mengabulkan permohonan dan menjatuhkan putusan diantaranya karena pada faktanya Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama Andreas Aditya Prasetiawan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5587/1997 tertanggal 19

Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta.

Kedua Hakim memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut termasuk memberikan ijin kepada Pemohon (Karyono) untuk menjual sebagian yang menjadi bagian dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut atas tanah hak milik No. 999 yang terletak di Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Surakarta, untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon tersebut. Sehingga atas dikabulkannya permohonan tersebut Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

7.2.Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain:

Pertama, untuk pemohon sebagai pihak yang diberi amanah dalam merawat dan mengelola harta bawaan milik anaknya yang masih di bawah umur hendaknya menggunakan harta milik anaknya semata-mata hanya untuk kepentingan anaknya dengan cermat dan bijaksana, dan apabila berkemungkinan harta tersebut juga dikembangkan agar bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang untuk anaknya.

Kedua, untuk keluarga terdekat dari pihak almarhum istri pemohon yakni saudara-saudara kandungnya hendaknya selalu mengawasi dan membantu dalam hal pengelolaan hasil penjualan harta bawaan.

Ketiga, untuk hakim pengadilan Negeri Surakarta hendaknya selalu berhati-hati dalam melindungi hak-hak anak yang masih di bawah umur dan selalu bijaksana agar tidak ada hak-hak anak yang dikebiri dalam penegakan hukum yang ada.

Keempat, untuk masyarakat secara umum agar senantiasa selalu belajar tentang hukum yang ada diIndonesia termasuk menambah

keahlian ilmu mengenai perwalian dan hak-hak anak sehingga tidak ada anak di Indonesia yang haknya dirampas atau ditelantarkan haknya.

7.3.Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Saudara-saudaraku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Kerabat dan handai taulan yang kusayangi, terimakasih atas do'a, dorongan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, K.Wantjik. 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soebekti, R. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke XVII, Jakarta: Intermasa.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 215
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya*, Bandung: Gitamaya Jaya.
- P. Scholten, 1934, *Serie Asser. "Algemeen Deel"*. Tjeenk Willink, Zwolle, hal 226

Web/Internet

Membagi Harta Bawaan dan Harta Warisan, diakses dari: <http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2010/01/membagi-harta-bawaan-dan-harta-warisan.html>, Diakses tanggal 23 September 2016, Pukul 14.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Terjemahan oleh R. Soebekti. Cetakan ke-VII. Jakarta: Inter Massa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan